



Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Nisa Oktaviani

Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Anjely Wahyuni

Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Wiwid Yulinda Sari

Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Faisal Hidayat

Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : : ¹nisahoktaviani09@gmail.com, ²anjely572@gmail.com,
³wiwidyulinda02@gmail.com, ⁴faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak. Artikel ini membahas tentang analisis perkembangan kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi islam. kebijakan fiskal adalah Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran yang ada di dalam negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada ekonomi islam kebijakan fiskal ditujukan sebagai sebuah alat untuk menciptakan satu tujuan sesuai prinsip syariah. Yang di dapat di katakana tujuan syariah adalah : menjaga kesejateraan dan keamanan masyarakat, kehidupan, menjaga keimanan, kekayaan, intelektualitas, serta kepemilikan. Dalam ekonomi islam ada prinsip – prinsip yang wajib di taati dalam melakukan kebijakan fiskal secara syariah/menurut islam. Salah satu prinsip-prinsip itu adalah prinsip bermuamalah adalah dimana setiap umat muslim akan dibebaskan dalam hal melakukan satu kegiatan atau aktivitas bisnis yang telah diwajibkan di dalam agama islam.

Kata Kunci: Perkembangan kebijakan fiskal, Kebijakan fiskal prespektif ekonomi islam

Abstract. This article discusses the analysis of the development of fiscal policy in the perspective of Islamic economics. fiscal policy is a fiscal policy is a policy made by the government with the aim of regulating income and expenditure in the country in order to maintain stability and encourage economic growth. In Islamic economics, fiscal policy is intended as a tool to create a goal in accordance with sharia principles. What can be said that the objectives of sharia are: maintaining the welfare and security of society, life, maintaining faith, wealth, intellect, and ownership. In Islamic economics there are principles that must be obeyed in carrying out fiscal policy according to sharia / according to Islam. One of these principles is the principle of muamalah, where every Muslim will be freed in terms of carrying out an activity or business activity that has been made obligatory in Islam.

Keyword: development of fiscal policy, fiscal policy perspective of Islamic economics

LATAR BELAKANG

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang penting dalam pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal sering digunakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti mengurangi pengangguran, menstabilkan inflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sejarah munculnya kebijakan fiskal dapat ditelusuri sejak zaman kuno, namun penggunaannya secara sistematis baru dimulai pada abad ke-18. Pada zaman kuno, kebijakan fiskal digunakan oleh para penguasa untuk mengumpulkan pajak dan membangun infrastruktur (Darnoto & Dewi, 2020). Di zaman modern, kebijakan fiskal semakin kompleks dan meluas, dan banyak negara menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam mengatur perekonomian mereka. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan dalam jurnal ini yaitu Studi literature, dimana Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber informasi elektronik lainnya. Peneliti dapat menggunakan metode ini untuk mempelajari konsep-konsep penting yang terkait dengan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam studi literatur untuk mengeksplorasi perkembangan kebijakan fiskal yang penting terkait dengan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam serta dalam Pencarian informasinya dilakukan secara online. Peneliti dapat melakukan pencarian informasi online melalui mesin pencari seperti Google Scholar, atau melalui website resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang terkait dengan kebijakan fiskal dan ekonomi Islam. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti "kebijakan fiskal Islam", perkembangan kebijakan fiskal, atau "ekonomi Islam" (Mubarok, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asal Mula Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Sejarah munculnya kebijakan fiskal dapat ditelusuri sejak zaman kuno, namun penggunaannya secara sistematis baru dimulai pada abad ke-18. Pada zaman kuno, kebijakan fiskal digunakan oleh para penguasa untuk mengumpulkan pajak dan membangun infrastruktur.

Di Yunani kuno, kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai perang dan membangun monumen seperti kuil dan teater. Di Roma kuno, kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai militer dan memperluas wilayah kekuasaan. Pada abad ke-18, kebijakan fiskal mulai digunakan secara sistematis oleh pemerintah Inggris dan Prancis.

Di Inggris, kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai perang melawan Prancis dan membangun infrastruktur seperti jalan tol. Di Prancis, kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai perang dan membangun istana-istana yang megah.

Pada abad ke-19, kebijakan fiskal mulai dikembangkan secara luas di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan jembatan. Di Jepang, kebijakan fiskal digunakan untuk membangun industri dan mengembangkan teknologi.

Sejak abad ke-20, kebijakan fiskal semakin kompleks dan meluas, dan banyak negara menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam mengatur perekonomian mereka (Belabes et al., 2015). Di tengah-tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat, kebijakan fiskal menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Suatu kebijakan berdampak terhadap pengeluaran dan penerimaan dalam sebuah pemerintahan, belum beberapa muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan Munculah suatu pendapat yang berguna untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintahan dalam mencapai suatu ekonomi yang stabil. Cara mengubah penerimaan dan penawaran suatu pemerintahan ini yang sering disebut dengan suatu kebijakan fiskal/politik fiskal.

Pada Tahun 1920-an, suatu Pengeluaran Pemerintahan Hanya bisa dianggap Sebagai Sebuah alat yang digunakan untuk Membiayai Kegiatan-Kegiatan yang ada dalam suatu Pemerintahan serta dinilai Atas suatu Asas Manfaat Langsung Yang Dapat

dirasakan tidak harus melihat dampaknya terhadap Pendapatan Nasional. Kemudian pajak hanya dijadikan Sebagai Sumber Pembiayaan pengeluaran suatu Negara serta belum juga diketahui dampaknya pada Pendapatan Nasional. Dalam penerimaan pemerintahan mengalami penurunan, oleh karena itu Pengeluaran di dalam suatu pemerintahan harus diminimalisir juga (Rahayu et al., 2022). Hal tersebut sangat berpengaruh bagi suatu pendapatan nasional, dan semakin menurunnya perekonomian. dalam suatu kebijakan yang dilaksanakan yaitu kebijakan moneter dalam Bank Sentral serta bukan dalam Kebijakan Fiskal. dalam Teori kebijakan fiskal saat pertama kali muncul akibat tidak adanya Kebijakan moneter Dalam Menanggulangi krisis ekonomi.

Kemudian dalam sebuah Kebijakan moneter bisa berguna untuk membawa ke dalam kegiatan individu / swasta (Mubarok, 2021). Saat terjadi pengangguran maka harga turun drastis, jadi kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara menambahkan nominal uang yang tersebar melalui jalur politik Dengan cara menurunkan tingkat bunga/dengan politik pasar terbuka, serta Pemerintahan dapat membeli surat berharga. Saat masa depresi yang sangat Parah yaitu mengenai masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Suatu pemikiran di dalam kebijakan fiskal merupakan bahwa pemerintahan tidak bisa disamakan dengan individu dan Pengaruhnya dalam suatu tindakan tersebut kepada masyarakat secara keseluruhan.

Pada umumnya suatu individu dapat mengurangi suatu pengeluaran jika Penerimaannya mengalami penurunan, sedangkan pemerintahan tidak harus melakukan itu, jadi apabila suatu perintah mengurangi pengeluaran, maka tindakan tersebut dapat lebih menyusahkan/ mempersulit jalannya suatu perekonomian, dimana menurunnya pengeluaran dalam suatu Pemerintahan akan berdampak pada menurunnya Pendapatan dalam masyarakat sebagai suatu objek pajak namun justru memperkecil Penerimaan Pemerintahan. Selain itu juga disadari bahwa didalam masa pemulihan semakin banyak uang masyarakat (Swasta) yang habis, hal ini dapat meningkatkan Pengeluaran Pemerintahan dan tidak akan mengurangi suatu investasi pada Sektor Swasta melalui peningkatan tingkat bunga (Inayati, Anindya, 2013).

B. Hambatan Dalam Perkembangan Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, antara lain (Rahayu et al., 2022):

1. **Batasan-batasan Syariah:** Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah harus memperhatikan batasan-batasan Syariah yang telah ditentukan oleh agama Islam. Misalnya, dalam pemungutan pajak, tidak semua jenis pajak dapat dikenakan kepada masyarakat karena harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.
2. **Pengelolaan Keuangan yang Benar:** Pelaksanaan kebijakan fiskal harus dilakukan dengan pengelolaan keuangan yang benar dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang digunakan untuk kebijakan fiskal.
3. **Kebebasan Ekonomi:** Dalam ekonomi Islam, kebebasan ekonomi adalah penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Syariah. Kebijakan fiskal yang menghambat kebebasan ekonomi mungkin tidak dapat diterima dalam perspektif ekonomi Islam.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Dalam Islam, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dianggap sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar dapat memperoleh dukungan dan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat.
5. **Peningkatan Pendidikan:** Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu kunci untuk mencapai kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu memahami dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal.
6. **Rendahnya kepatuhan pajak masyarakat:** Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat basis fiskal. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, baik karena kurangnya kesadaran atau akibat rendahnya kualitas layanan publik.

7. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara: Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan anggaran negara. Namun, masih banyak kebijakan fiskal yang kurang transparan dan tidak akuntabel, sehingga dapat memicu penyelewengan anggaran dan korupsi.
8. Penggunaan praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara: Praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara bisa mengakibatkan krisis ekonomi dan keuangan yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi. Namun, penggunaan praktik tersebut masih cukup tinggi dalam pengelolaan anggaran negara di beberapa negara.
9. Penggunaan praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara: Praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara bisa mengakibatkan krisis ekonomi dan keuangan yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi. Namun, penggunaan praktik tersebut masih cukup tinggi dalam pengelolaan anggaran negara di beberapa negara.
10. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam: Pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam masih terbatas di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan fiskal yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti penggunaan praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran Negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan kebijakan fiskal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. (Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D, 2022)

C. Strategi dalam Mengatasi Hambatan Hambatan Perkembangan Kebijakan Fiskal

Untuk mengatasi hambatan dalam perkembangan kebijakan fiskal, terutama dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Mempertimbangkan Prinsip-prinsip Syariah: Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah dalam Islam seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan larangan riba. Kebijakan fiskal yang diterapkan harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan keuangan yang benar dan transparan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan tidak terjadi penyalahgunaan keuangan yang merugikan masyarakat.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal sangat penting. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang cukup agar masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan fiskal yang diambil.
4. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan fiskal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendidikan dan pelatihan ini akan membantu masyarakat untuk memahami dan mengerti pentingnya kebijakan fiskal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan.
5. Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Efektif: Pemerintah harus mengembangkan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal harus diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mempertimbangkan dampak yang akan timbul di masa yang akan datang.

Dalam mengatasi hambatan dalam perkembangan kebijakan fiskal, pemerintah harus mengambil strategi yang tepat dan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan fiskal yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan strategi yang tepat dan efektif. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan

pemahaman dan kesadaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, memberikan insentif bagi pengembangan sektor riil, mengurangi penggunaan praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, serta mendorong kepatuhan pajak masyarakat. (Belabes, A., 2015)

D. Pengaruh Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Dalam prespektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam:

1. **Memperkuat Redistribusi Kekayaan:** Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu pemerintah dalam memperkuat redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mengurangi Ketidakstabilan Ekonomi:** Kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi ketidakstabilan ekonomi dan meningkatkan kestabilan ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat merespons perubahan ekonomi secara efektif dan menghindari krisis ekonomi yang dapat merugikan masyarakat.
3. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan anggaran yang tepat dan efisien. Pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur, memberikan dukungan kepada sektor ekonomi yang potensial, dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. **Meningkatkan Investasi:** Kebijakan fiskal yang tepat juga dapat meningkatkan investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada investor dan mengurangi beban pajak yang berlebihan, sehingga meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di negara tersebut.
5. **Meningkatkan Kepatuhan Pajak:** Dalam perspektif ekonomi Islam, membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat, sehingga meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat keuangan negara.

Dalam prespektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat memperkuat redistribusi kekayaan, mengurangi ketidakstabilan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. (Mubarok, F. K.,2020)

E. Ciri Ciri Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Berikut adalah beberapa ciri-ciri perkembangan kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam:

1. Berbasis pada Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi dasar dalam kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal harus memperkuat redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menghindari Riba dan Gharar: Dalam ekonomi Islam, riba dan gharar (ketidakpastian) dianggap sebagai praktik yang dilarang. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus menghindari praktik-praktik ini dalam pengelolaan anggaran negara.
3. Berorientasi pada Kemaslahatan Publik: Tujuan utama kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam adalah meningkatkan kemaslahatan publik. Kebijakan fiskal harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. (Mubarok, F. K.,2020)
4. Menjaga Keseimbangan Ekonomi: Kebijakan fiskal harus mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pemerintah harus memastikan pengelolaan anggaran yang tepat dan efisien agar tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
5. Mengutamakan Investasi Riil: Investasi riil, seperti investasi pada sektor infrastruktur dan produksi, dianggap lebih diutamakan dalam prespektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus mengarahkan penggunaan anggaran negara pada investasi riil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Berbasis pada Keterbukaan dan Transparansi: Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi ciri penting kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang penggunaan anggaran negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
7. Mengedepankan Kepatuhan Pajak: Dalam prespektif ekonomi Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus mengedepankan kepatuhan pajak masyarakat dan mendorong pengembangan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Demikianlah beberapa ciri-ciri perkembangan kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam (Rasmi, 2016). Dalam pengembangannya, kebijakan fiskal harus memperkuat prinsip keadilan, menghindari riba dan gharar, mengedepankan kemaslahatan publik, menjaga keseimbangan ekonomi, mengutamakan investasi riil, berbasis pada keterbukaan dan transparansi, serta mengedepankan kepatuhan pajak masyarakat. (Rasmi, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam prespektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus memperkuat prinsip keadilan, menghindari riba dan gharar, mengedepankan kemaslahatan publik, menjaga keseimbangan ekonomi, mengutamakan investasi riil, berbasis pada keterbukaan dan transparansi, serta mengedepankan kepatuhan pajak masyarakat. Dalam sejarah, kebijakan fiskal mulai dikembangkan pada masa Yunani Kuno, Romawi, dan Dinasti Tang di Cina. Penggunaan kebijakan fiskal menjadi semakin luas pada abad ke-20, terutama setelah munculnya Krisis Ekonomi Besar pada tahun 1929. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal berkembang seiring dengan lahirnya negara-negara Islam yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan ekonomi. Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi perkembangan kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam. Beberapa hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, kurangnya perhatian terhadap pengembangan sektor riil, kecenderungan menggunakan praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara, dan

kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, strategi-strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, mengedepankan investasi pada sektor riil, menghindari praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara, mendorong keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, serta mendorong kepatuhan pajak masyarakat.

Pengaruh kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan kebijakan fiskal yang tepat dan efektif dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan kebijakan fiskal yang tepat juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya.

Secara keseluruhan, perkembangan kebijakan fiskal dalam prespektif ekonomi Islam memiliki beberapa ciri-ciri penting, seperti berbasis pada prinsip keadilan, menghindari riba dan gharar, mengedepankan kemaslahatan publik, menjaga keseimbangan ekonomi, mengutamakan investasi riil, berbasis pada keterbukaan dan transparansi, serta mengedepankan

Demikianlah artikel ini penulis buat. Semoga bermanfaat bagi pembaca, dalam artikel ini tentunya ada banyak sekali koreksi dari pembaca, karena penulis menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pada pembaca yang dengan itu semua penulis harapkan artikel ini akan menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Belabes, A., Belouafi, A., & Daoudi, M. (2015). Designing Islamic Finance Programmes in a Competitive Educational Space: The Islamic Economics Institute Experiment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *191*, 639–643. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.300>
- Darnoto, & Dewi, hesti triyana. (2020). Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbawi*, *Vol. 17. N(1)*, 46–60.
- Inayati, Anindya, A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, *14(2)*, 164–176. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/2015/1433>

- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharāj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf. *Jurnal Ekonomica Sharia*, 1(1), 125–144.
- Rasmi. (2016). Pemberian Potongan Harga Dengan Penggunaan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Ramayana M'Tos Makassar. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 1(2), 181–199. <http://idr.uin-antasari.ac.id/9432/>